



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI: <https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.2484>
<http://ejournal.upnja.tim.ac.id/index.php/jdg/index>

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN DESA TANGGUH BENCANA DI KABUPATEN MOROWALI UTARA

Novie R. Pioh¹, Stefanus Sampe², Twinsky Monica³
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi^{1,2,3}

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 1 Maret 2023

Revised date: 21 Maret 2023

Accepted date: 25 April 2023

ABSTRACT

Strengthening the capacity of communities in villages/kelurahans is a strategic effort to realize BNPB's vision of "National Resilience in Facing Disasters". One of the programs is the Disaster Resilient Village/Kelurahan (Destana). North Morowali Regency, Central Sulawesi Province is one of the regencies that are included in the multi-disaster-prone areas on Sulawesi Island and having a BNPB disaster risk index number of 189 (high category). So, according to the direction of the National Regional Disaster Management Agency (BNPB), North Morowali Regency is expected to start implementing strategies, actions and policies in order to realize the Disaster Resilient Village program. The research used a qualitative approach. Qualitative research is descriptive in nature and tends to use analysis with an inductive approach. This research was carried out in North Morowali Regency, Central Sulawesi involving the North Morowali Regency Regional Disaster Management Agency and the Governments of Ganda-Danda Village, Bunta Village, and Bahontula Village. The result of this study is that of the 122 villages in North Morowali Regency which are planned to be suspended, only 15 villages are categorized as disaster resilient due to the many constraints, one of which is due to budgetary factors. However, the North Morowali BPBD is still trying to carry out its role in carrying out this program through activities that can support the success of realizing a Disaster Resilient Village.

Keywords: Role, Local Government, Disaster Resilient Village.

ABSTRAKSI

Penguatan kapasitas masyarakat di Desa/Kelurahan adalah upaya strategis untuk mewujudkan visi BNPB yaitu "Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana". Salah satu programnya yakni Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana). Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam wilayah multirawan bencana di Pulau Sulawesi dilihat dari kondisi yang ada saat ini Kabupaten Morowali Utara memiliki angka indeks risiko bencana BNPB 189 (kategori tinggi). Oleh karena itu, sesuai dari arahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) Kabupaten Morowali Utara diharapkan mulai melaksanakan strategi, tindakan, dan kebijakan agar dapat mewujudkan program Desa Tangguh Bencana tersebut. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Pemerintah Desa Ganda-Ganda, Desa Bunta, serta Kelurahan Bahontula. Hasil dari penelitian ini adalah dari 122 desa di Kabupaten Morowali Utara yang rencananya akan ditangguhkan, baru sebanyak 15 desa yang dikategorikan tangguh bencana karena banyaknya kendala yang ada salah satunya karena faktor anggaran. Akan tetapi dari pihak BPBD Morowali Utara pun tetap berupaya menjalankan perannya dalam menjalankan program ini melalui kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan mewujudkan Desa Tangguh Bencana.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah Daerah, Desa Tangguh Bencana.

PENDAHULUAN

Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Upaya penanggulangan bencana menjadi urusan semua pihak, yakni pemerintah, lembaga non pemerintah, dunia usaha, dan partisipasi aktif masyarakat seperti yang dimandatkan dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Upaya penanganan masyarakat dilakukan oleh Desa/Kelurahan secara mandiri maupun pihak lain untuk memastikan keberlanjutannya tanpa intervensi pemerintah, setiap desa/kelurahan telah memiliki ketangguhan masing-masing, yang kita kenal dengan kearifan lokal (local wisdom). Untuk menanggulung desa/kelurahan tidak bisa dilakukan dalam waktu setahun. Butuh proses dalam membangun ketangguhan yang berkelanjutan. Menjadikan budaya sadar bencana menjadi nilai-nilai pembangunan di desa/kelurahan. Untuk itulah BNPB bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyusun Buku Penilaian Ketangguhan Desa melalui program Desa Tangguh Bencana (DESTANA). Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Dalam Destana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu kabupaten

yang termasuk dalam wilayah multirawan bencana di Pulau Sulawesi. Salah satu penyebabnya adalah sebagian wilayah kabupaten ini dilewati Sesar Aktif Matano sehingga sangat peka terhadap proses tektonik di sepanjang Pulau Sulawesi. Selain itu, terjadinya perubahan signifikan pada pola cuaca akibat pemanasan global seperti fluktuasi suhu musiman, fluktuasi curah hujan, perubahan pola arah angin, serta semakin meningkatnya lahan kritis karena adanya izin pertambangan dan kelola hasil hutan cenderung memperbesar intensitas dan frekuensi kejadian banjir bandang.

Kabupaten Morowali Utara juga merupakan salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan Sumber Daya Alam, salah satunya yaitu tambang nikel. Di samping itu, pertambangan nikel sebenarnya tidak hanya membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat lokal, akan tetapi juga membawa banyak dampak negatif jika dilihat dari dampaknya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat yang bermukim di area pertambangan tersebut. Berikut adalah penampakan gunung yang sudah hampir gundul oleh karena aktivitas pertambangan :



Gambar 1. Gunung yang hampir gundul karena aktivitas pertambangan

Dari tahun 2020-2022 yang telah dikategorikan sebagai desa tangguh bencana baru sebanyak 15 desa. Hal ini diakibatkan karena terbatasnya jumlah dan kualitas SDM BPBD yang memiliki kompetensi dan pengetahuan tentang desa tangguh bencana, belum optimalnya ketersediaan anggaran dan kerjasama dengan stakeholder lain dalam pembinaan desa tangguh bencana, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya (BPBD, DINSOS, DINKES, dan BPMD), kemudian BPBD Morowali Utara juga belum memiliki Kajian Risiko Bencana Kabupaten.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Menurut Creswell (1998), menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti suatu kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami. Menurut Sugiyono (2014:2) penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang terkumpul dan dianalisa secara kualitatif. Dimana peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan.

Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi (dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung), wawancara (wawancara dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab), dokumentasi (mencari data mengenai sesuatu hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, majalah, agenda dan sebagainya). Pengolahan data dilakukan dalam bentuk pertama setelah pengumpulan data selesai kemudian melakukan reduksi data, yaitu menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan pengorganisasian, sehingga data terpilah-pilah. Kedua, data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk naras. Ketiga, adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap kedua dengan mengambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini digunakan teori pengukuran peran sebagaimana yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015) yaitu : Harapan, Wujud Perilaku, Penilaian, dan Sanksi.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015:224) bahwa peran teori peran diistilahkan menjadi empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi social, perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, kedudukan orang-orang dalam perilaku dan kaitan antara orang dan perilaku.

1. Harapan

Menurut Biddle dan Thomas, harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang sejatinya ditunjukkan oleh seseorang atau organisasi yang mempunyai peran tertentu . Terkait aspek harapan dengan apa yang diuraikan diatas yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama di lapangan diketahui bahwa harapan ini dikatakan belum maksimal tercapai. Bisa dilihat dari 64 desa yang diharapkan akan tangguh, tapi bukti nya setengah dari 64 pun belum tercapai. 15 dari 64 desa itu terbilang prosesnya sangat lama jika programnya sudah ada sejak tahun 2017. Hasil wawancara pun mengatakan bahwa program tersebut terakhir dilaksanakan pada tahun 2020, dan hingga saat ini program Desa Tangguh Bencana belum berjalan lagi dikarenakan banyaknya kendala yang ada.

Karena pada dasarnya, program ini bukan hanya peran dari BPBD itu sendiri, melainkan banyak pihak yang terkait misalnya dari desa ataupun masyarakat. Kenyataannya, kebanyakan desa di Kabupaten Morowali Utara mempunyai alokasi anggaran desa yang minim untuk dana siap pakai dalam penanggulangan bencana. Dari pihak BPBD pun mengatakan bahwa yang hadir dalam sosialisasi pun hanya perangkat desa dan tokoh masyarakat karena jika melakukan sosialisasi tentu saja menggunakan anggaran yang besar seperti misalnya untuk biaya konsumsi dan lain sebagainya yang menjadi bahan pertimbangan bagi BPBD jika menghadirkan banyak masyarakat. Disini kurang bagaimana materi yang diberikan kepada pihak-pihak yang datang mendengar materi sosialisasi dibagikan kepada masyarakat.

Walaupun demikian, dari pihak BPBD Morowali Utara akan terus berupaya melalui kegiatan-kegiatan yang telah mereka persiapkan untuk mewujudkan harapan tersebut.

2. Wujud Perilaku

Menurut Biddle dan Thomas yaitu peran diwujudkan dalam perilaku nyata, bukan sekedar harapan. Wujud perilaku dalam hal ini yaitu kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh BPBD

secara nyata. Terkait wujud perilaku, dari pihak BPBD Morowali Utara telah mengatakan bahwa mereka membuat mitigasi struktural dan non struktural. Mitigasi struktural yang didalamnya mencakup mengadakan pembangunan infrastruktur penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dini yang dimaksud disini yaitu jika terjadi misalnya banjir dibangun semacam normalisasi sungai yang telah dibuat di Desa Togo Mulya, tanggul penahan ombak telah dibuat di Desa Uewaju dan tanggul penahan longsor telah dibuat di Desa Bungintimbe.

Kemudian mitigasi non struktural adalah dalam bentuk pencegahan misalnya sosialisasi. Tidak hanya sosialisasi, tapi ada juga dalam hal pengembangan sebuah sistim informasi kebencanaan yang diberi nama (SIRABA) Sistem Informasi Daerah Rawan Bencana Alam. SIRABA yaitu sistem informasi elektronik berbasis aplikasi android yang memuat tentang informasi kebencanaan di Kabupaten Morowali Utara. Tujuan jangka panjang dari SIRABA ini yaitu terbangunnya sistem informasi kebencanaan yang berbasis digital website (Platform Android) dan terlaksananya program mitigasi bencana secara cepat dan tepat waktu secara berkelanjutan. Adapun 5 fungsi aplikasi SIRABA ini yaitu : 1. sebagai instrumen manajemen data desa tangguh bencana, 2. penyebarluasan informasi, edukasi, & sosialisasi, 3. Mempermudah akses lapor cepat, dan pengaduan masyarakat, 4. sebagai alat bantu pelaporan kaji cepat TRC, 5. persiapan untuk membentuk PUSDALOPS-PB. Dengan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh aplikasi SIRABA ini yaitu sistem ini mempermudah masyarakat untuk menerima informasi tentang kebencanaan dimana pun dan kapan pun”.

Tidak hanya sebatas sampai disitu, akan tetapi mitigasi non struktural ini juga didalamnya mencakup membuat kajian daerah tentang mitigasi bencana yang dikaji oleh bagian hukum yang akhirnya dibuatlah regulasi untuk pencegahan dampak lingkungan yang terkena bencana kemudian diajukan ke Bupati. Regulasi ini dibuat dan diajukan sesuai dengan survei yang telah dilakukan oleh BPBD Morowali Utara terhadap desa yang sangat dekat dengan area pertambangan. Karena bukan hanya berdampak bagi lingkungan yang rusak sampai sering terjadi tanah longsor, akan tetapi juga berdampak bagi kesehatan masyarakat yang bermukim di sekitar area pertambangan tersebut.

3. Penilaian

Menurut Biddle dan Thomas penilaian dalam peran yaitu pemberian kesan positif atau negatif yang didasarkan pada harapan masyarakat terhadap peran dimaksud.

Penilaian sangatlah penting dalam meninjau sejauh mana BPBD Morowali Utara dalam menjalankan perannya. Penilaian pun akan dinilai dari sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap peran BPBD selama ini. Oleh karena itu, dalam rangka mengetahui penilaian masyarakat terhadap BPBD disusunlah pertanyaan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan agar desa tersebut dikatakan sudah tangguh bencana. Kriteria tersebut antara lain sebagai berikut : 1. Antisipasi (mampu mengantisipasi dan meminimalisasi kekuatan yang merusak/ancaman bencana dengan cara melakukan adaptasi, 2. Manajemen (mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana), 3. Rehabilitasi (kalau terkena dampak bencana, mereka akan dengan cepat bisa membangun kehidupannya menjadi normal kembali).

Pertanyaan disusun dengan jawaban Ya atau Tidak dan setiap jawaban Ya akan diberi skor 1, sementara jawaban Tidak akan diberi skor 0. Untuk kegiatan penilaian ini terakhir dilaksanakan di tahun 2020, dan untuk status atau tingkatan berdasarkan skor yang diperoleh Morowali Utara menempati status atau tingkatan Desa Tangguh Bencana Pratama dan mungkin akan meningkat setelah BPBD Morowali Utara melakukan survei lagi di tahun 2023.

Disisi lain, penilaian pun disampaikan oleh salah satu kepala desa yang desanya menjadi salah satu daerah yang rawan akan bencana. Disitu dia menilai bahwa peran BPBD Morowali Utara belum maksimal dalam hal kelengkapan alat-alat untuk menunjang penanganan bencana.

4. Sanksi

Menurut Biddle dan Thomas Sanksi adalah usaha seseorang atau organisasi untuk mempertahankan suatu nilai positif agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya dinilai negatif menjadi positif.

Dalam kaitannya dengan perwujudan peran dari negatif menjadi positif, jika dilihat dari desa yang tangguh baru 15 dari 64 desa sebenarnya peran nya bisa dinilai negatif, akan tetapi dalam hal usaha mempertahankan suatu nilai positif disini BPBD Morowali Utara telah membentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) yang

didalamnya beranggotakan OPD terkait dan beberapa pihak seperti PMI, Tokoh Masyarakat, Komunitas Pencinta Alam, dan Pramuka. Forum PRB ini bertujuan membangun koordinasi yang baik antar lintas stakeholder dalam upaya penanganan bencana.

Usaha tersebut tampaknya belum bisa dikatakan maksimal karena nyatanya baru beberapa desa saja yang bisa menangani atau mengatasi dengan mandiri ancaman bencana yang bisa saja terjadi pada desa mereka. Seperti Desa Bunta yang telah siap ketika menghadapi bencana, akan tetapi tidak pada desa lainnya yang masih bergantung pada pertolongan atau tindakan dari BPBD itu sendiri.

KESIMPULAN

1. Harapan. Diketahui bahwa harapan mewujudkan sebanyak 64 desa ini belum terwujud karena sampai saat ini baru sebanyak 15 desa yang diwujudkan sebagai desa tangguh bencana karena banyaknya kendala yang ada. Maka dari itu indikator harapan ini dikatakan belum maksimal. Harapan dalam mewujudkan sebanyak 64 desa tangguh bencana harus terus dilaksanakan, karena Kabupaten Morowali Utara adalah salah satu daerah yang berpotensi sering terjadi bencana dan tentu saja juga karena bencana ini adalah masalah yang serius dalam aspek kehidupan kita bermasyarakat.

2. Wujud Perilaku. Pada indikator ini peneliti menilai bahwa BPBD Morowali Utara dibantu dengan Pemerintah Desa telah melaksanakan perannya sebagaimana mestinya, hanya saja karena program ini memerlukan anggaran yang cukup besar maka segala bentuk kegiatan yang sebenarnya mereka laksanakan jadi tidak terlaksana. Pemerintah Daerah sebaiknya mempunyai perhatian khusus untuk menyediakan anggaran agar program tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dalam hal ini BPBD Morowali Utara juga harus berupaya mengkoordinasikan dengan pihak terkait misalnya dalam hal pembuatan proposal anggaran yang diajukan untuk program Desa Tangguh Bencana ini.

3. Penilaian. Dapat dilihat dari penilaian masyarakat ada yang menilai negatif dan positif tapi jika disimpulkan BPBD Morowali Utara sudah cukup baik dalam melaksanakan perannya karena telah berhasil membuat beberapa desa yang telah mandiri dalam menghadapi bencana. Ketika melaksanakan sosialisasi, sebaiknya menghadirkan lebih banyak masyarakat setempat karena sosialisasi ini kadang kala hanya berhenti pada perangkat desa atau tokoh

masyarakat tertentu yang hadir sehingga dalam penyampaian informasi atau materi yang disampaikan belum cukup maksimal dan merata diketahui atau didengar oleh masyarakat.

4. Sanksi. Upaya mempertahankan nilai positif masih perlu banyak yang harus dilakukan oleh BPBD seperti membuat strategi atau kegiatan-kegiatan yang dapat mewujudkan beberapa Desa lagi agar dikatakan tangguh. BPBD Morowali utara sebaiknya melakukan koordinasi bersama desa-desa untuk membangun saluran drainase yang merupakan salah satu bangunan pelengkap pada ruas jalan berfungsi untuk mengalirkan air yang dapat mengganggu pengguna jalan, sehingga badan jalan tetap kering.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Hendriyanto. & N, Permata. 2017. "Menuju Desa Tangguh Bencana (di Desa Sironoboyo)". *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 13, no.1 (halaman 11).
- A, Najib. & H, Rahmat. 2021. "Analisis Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana di Desa Buluh Cina, Siak Hulu, Kampar, Riau." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no.1 (halaman 15).
- Bauer, Jeffrey C. (2003) Role Ambiguity and Role Clarity : A Comparison of Attitudes in Germany and the United States (55-56)
- Creswell, J.W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Tradition*. London: Sage Publications
- Dougherty, T.W., & Pritchard, R.D.(1985). The measurement of role variables: exploratory examination of a new approach, *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 55-56
- Hia, Era Era. " The Role of the Supervisor Board in Improving Drinking Water Service For the Community of Tangerang Regency". *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, (halaman 38).
- Hoessein dalam Hanif, pengertian pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jakarta, 2007: 24
- Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi*

- Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah.
Jakarta: Gramedia.
- Sarwono, Sarlito W., 2015, Teori-teori Psikologi Sosial, PT. Raja Grafindo Persada, : Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 2009. Administrasi Pembangunan, Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Suhardono, Edi. 2018. Teori Peran konsep, Derivasi dan Implementasinya Jakarta: Gramedia.
- Takalawengen, Mervi, Michael Mantiri, Donald Monintja. "Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Pemuda di Desa (Lesabe Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe)". *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan (2019)*. 3(3) : 3-4.

Dokumen

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Perka BNPB No.1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
3. Petunjuk Teknis Penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Morowali Utara tahun 2016.

Website

- BNPB. "Definisi Bencana", <https://bnpb.go.id/definisi-bencana>, diakses pada Sabtu 15 Oktober 2022.
- BNPB. "Tentang Desa Tangguh Bencana", <https://bnpb.go.id/berita/perka-bnpb-no-1-2012-tentang-pedoman-umum-desa-kelurahan-tangguh-bencana>, diakses pada Sabtu, 15 Oktober 2022.
- PEMKAB MOROWALI UTARA. morowaliutarakab.go.id/page/profile/2